BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Fahrudin, 2018: 10).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2018:10), Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

 Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan Masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumbersumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hiduf yang memuaskan.

Dari tujuan kesejahteraan sosial tersebut jelas sekali bahwa kesejahteraan sosial berorientasi pada terpenuhinya segala kebutuhan baik primer ataupun sekunder dimana akan dapat terwujud jika terdapat interaksi dan kolaborasi yang baik antar elemen baik dari individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Pada suatu permasalahan sosial dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk menggali isu-isu kesejahteraan sosial dan juga membuat sistem perencanaan yang berguna untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi.

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Friedlander (2012: 12) mengemukakan 4 fungsi kesejahteraan sosial:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan Masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam Masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisikondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam Masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya soail dalam Masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Keempat fungsi tersebut menjadi salah satu acuan dalam praktik pekerjaan sosial agar para praktisi atau akademisi tidak bingung akan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial. sehingga sejatinya seorang pekerja sosial yang baik haruslah dapat mengetahui isu permaslahan sosial pada sektor mikro, mezzo, ataupun makro.

2.1.4 Usaha Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

UU No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bahkan Friedlander (dalam Fahrudin, 2012: 15) mengemukakan bahwa:

"Usaha Kesejahteraan sosial yaitu sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempuranaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesejahteraan Masyarakat, pendidikan, rekreasi. perlindungan buruh dan perumahan".

Dari pernyataan tersebut dapat membantu memahami kita mengenai klasifikasi metode praktik pekerjaan sosial, sebagaimana yang kita ketahui pekerjaan sosial ini dibagi menjadi 3 metode yaitu: Social Case Work (Terapi individu dan keluarga), Social Group Work (Bimbingan sosial kelompok), dan Community Organizing / Community Development (Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat).

2.1.5 Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Dalam suatu upaya kesejahteraan sosial terdapat ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/ badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan Masyarakat, karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab Pemerintah melainkan juga tanggung jawab Masyarakat. Mobilisasi dan dan sumber (*Fund Raising*) merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan ematamata.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6. Peran serta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta Masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada Masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Salah satu organisasi internasional yang menaungi para pekerja sosial yaitu *International Federation of Social Workers (IFSW)* menjelaskan pekerjaan sosial sebagai berikut:

"The Social work profession promotes sosial change, problem solving ini human relationships and the empowerment and liberation of people enchance wellbeing. Utilizing theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the point where people interact with their environtments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social wor. (IFSW, 2000)

Artinya: Profesi pekerjaan sosial memingkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunkan teori-teori perilaku manusia dan system sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

2.2.2 Keberfungsian Sosial (Social Functioning)

Fokus atau perhatian pekerja sosial yaitu pada *Social functioning* atau keberfungsian sosial di mana pekerja sosial berusaha untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial orang, kelompok atau masyarakat.

Barlett (1970) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan focus utama pekerjaan sosial. Menurut Barlett, keberfungsian ini meliputi kemampuan untuk mengatasi (coping) tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan tuntutan lingkungan dan kemampuan antara

mengatasinya oleh individu. Jika terjadi ketidakseimbangan antara keduanya maka terjadi masalah, misalnya tuntutan lingkungan melebihi kamampuan mengatasi yang dimiliki individu. Dalam hal ini pekerja sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan mengatasinya secara individu.

Menurut Siporin (1975) keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga perkumpulan, komunitas, dan sebagainnya, berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Keberfungsian sosial menunjukan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial ini dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteaan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial.

2.2.3 Unsur-unsur Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi mempunyai unsur-unsur yang harus diketahui oleh seorang praktisi kesejahteraan sosial dan juga para akademisi di bidang kesejahteraan sosial. Hepworth, Rooney, dan Larsen (dalam Fahrudin, 2012: 65) menyatakan bahwa terdapat 4 unsur inti yang mendasari praktik pekerjaan sosial, yaitu:

- 1. Maksud/tujuan profesi itu.
- 2. Nilai-nilai dan etika.
- 3. Dasar pengetahuan praktik langsung.
- 4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, serta dimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau Masyarakat.

2.2.4 Misi, Maksud, dan Tujuan Pekerjaan Sosial

Misi pekerjaan sosial digambarkan oleh Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial atau *Council on Social Work Education* (CSWE) dimana mereka berpendapat bahwa profesi pekerjaan sosial mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human-well being*) dan untuk mengurangi kemiskinan dan penindasan. Heworth, Rooney, dan Larsen (dalam Fahrudin, 2012: 66). Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam Masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan Masyarakat.

Menurut NASW dan Zastrow (dalam Fahrudin, 2012: 66-67) dikemukakan bahwa praktik pekerjaan sosial mempunyai tujuan yaitu:

- Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), dan perkembangan.
- Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
- Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- 4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
- 5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber malalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- 7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
- 8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.5 Peran Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial memiliki tugas serta tanggung jawab untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya dengan tujuan untuk mencapai keberfungsian sosialnya sebagai suatu kewajiban dari profesi pekerjaan sosial. Menurut Sukoco (2011:22) peranan pekerjaan sosial yakni sebagai berikut:

a. Sebagai pemercepat perubahan (enabler)

Seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompk dan masyarakat dalam mengakses system sumber yang ada, mengidentifikasi masalah, dan megembangkan kapasitasnya agar masalah dapat teratasi hingga kebutuhannya terpenuhi.

b. Peran sebagai perantara (broker)

Yakni dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat, lembaga pelayanan dalam hal ini meliputi:Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.

c. Pendidik (educator)

Dalam hal ini seorang pekerja sosial diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu, kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahannya.

d. Tenaga ahli (expert)

Pekerja sosial memberikan masukan-masukan, saran serta dukungan informasi didalam berbagai hal.

e. Perencana sosial (social planer)

Seorang pekerja sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu, kelompok, maupun masyarakat. Menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional didalam mengakses sistem sumber untuk dapat mengatasi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan baik individu, kelompok, maupun masyarakat.

f. Fasilitator

Seorang pekerja sosial memberikan dukungan pengembangan kepada masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan individu, kelompok dan masyarakat, menjadi kualitas untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan didalam proses tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial Industri

2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Industri

Pekerjaan sosial industri dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja.

Pekerjaan sosial industri menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program, dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Inti pekerjaan sosial industri meliputi kebijakan, perencanaan, dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerja sosial dan dunia kerja. (Suharto 2006b). Kegiatan pekerjaan sosial industri antara lain adalah program bantuan (bagi pegawai), promosi keshatan , manajemen perawatan kesehatan, tindakan alternatif affirmatif (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan, dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responbility), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan jabatan, perencanaan sebelum dan sesudah pensiun serta bantuan pemindahan kerja.

2.3.2 Konsep Pekerjaan Sosial Industri

Konsep pekerjaan sosial industri lebih luas dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun masyarakat (community development). Pekerjaan sosial industri mencangkup pelayanan sosial

yang bersifat internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling. Terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, pekerjaan sosial industri, berwujud dalam berbagai bentuk program CSR termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial, dan advokasi sosial

2.3.3 Garapan Pekerjaan Sosial Industri

Beberapa contoh bidang garapan atau setting utama yang sering kali menjadi tempat berkiprah para pekerja sosial yaitu antara lain:

- a. Keluarga dan pelayanan anak: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak, dan adopsi, perawatan harian, pencagahan penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental. Rehabilitasi vokational, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, harm reduction programmer.
- c. Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketetanggaan, perawatan lingkungan hidup, kehutanan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.
- d. Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, *social fund*, JKSM, jaringan pengaman sosial.
- e. Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan: manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
- f. Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan. Pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

g. Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stress, dan burnout, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responbility*)

2.3.4 Tugas Pekerjaan Sosial Industri

Menurut Johnson (1984:263-264) ada 3 bidang tugas pekerja sosial yang bekerja di perusahaan antara lain:

- a. Kebijakan, perencanaan dan administrasi.Bidang ini umumnya tidak melibatkan pelayanan sosial secara langsung. Sebagai contoh, perumusan kebijakan untuk peningkatan karir, pengadministrasian program-program tindakan afirmatif, pengkoordinasian program-program jaminan sosial dan bantuan sosial bagi para pekerja, atau perencanaan kegiatan-kegiatan sosial dalam departemen perusahaan.
- b. Praktik langsung dengan individu, keluarga, dan populasi khusus. Tugas pekerja sosial dalam bidang ini meliputi intervensi krisis (*crisis intervention*), assesmen (penggalian) masalah-masalah personal, dan pelayanan rujukan, pemberian konseling bagi para pensiunan atau pekerja yang menjelang pensiun.
- c. Praktik yang mengkombinasikan pelayanan sosial langsung dan perumusan kebijakan sosial bagi perusahaan. Para pekerja sosial telah memberikan kontribusi penting dalam memanusiakan dunia kerja. Mereka umumnya terlibat dalam konseling di dalam maupun di luar perusahaan, pengorganisasianprogram-program personal, konsultasi dengan manajemen dan serikat-serikat kerja mengenai konsekuensi kebijakan-kebijakan perusahaan terhadap pekerja, serta bekerja dengan bagian kesehatan dan kepegawaian untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dan kualitas tenaga kerja (Johnson,1994;Suharto,1997).

2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Kekuatan dan Kebutuhan

Kekuatan-kekuatan manusia merupakan landasan bagi praktik pekerjaan sosial, yaitu sumber energi untuk menyadari ada masalahmasalah, tetapi pekerjaan sosial terutama berusaha untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sistem klien, baik sebagai individu, kelopok maupun Masyarakat. Pekerjaan sosial pemberdayaan lebih menekankan kekuatan daripada masalah yang ada pada sistem klien.

2.4.2 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Gutierrez (dalam Fahrudin, 2012: 68), Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antar pribadi, atau politik sehingga tiap individu, keluarga dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas Masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

2.4.3 Faktor Ketidakberdayaan

Pemberdayaan muncul akibat adanya ketidakberdayaan, dan juga terdapatnya kelompok lemah. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Menurut Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979), menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997).

Terdapat indikator-indikator pemberdayaan yang dapat menunjukan bahwa seseorang itu berdaya atau tidak yaitu:

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan

- kebutuhan dirinya. Terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: individu ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai Pemerintah desa/Kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: seperti memiliki rumah, aset tanah, aset produktif dan tabungan.

2.4.4 Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

Menurut Susiladiharti dalam Huraerah (2011), keberdayaan masyarakat terbagi kedalam 5 tingkatan, yakni:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar.
- Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik.
- Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan juga lingkungannya.
- d. Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di Masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
- e. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

 Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan Pemerintahan.

 Tingkatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.0: Tingkat Keberdayaan Masyarakat Menurut Susiladiharti

Mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat dan lingkungan yang lebih luas

Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan atas diri sendiri dan lingkungannya

Terjangkaunya sistem sumber atau akses terhadap layanan publik

Terpenuhinya kebutuhan dasar

2.4.5 Pemberdayaan dalam Pekerjaan Sosial

Dari awal pekerjaan sosial sudah bercirikan memberdayakan orang. Terdapat ungkapan lama yang menyatakan bahwa pekerja sosial bertujuan "to help people to help themselves", yaitu membantu orang untuk dapat membantu dirinya sendiri. Ini berarti bahwa pekerjaan sosial tidak menolong orang untuk menerima bantuan dan terus bersandar pada bantuan orang lain, melainkan ialah membangkitkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri

Praktik pekerjaan sosial dilaksanakan dalam dua cara, yaitu secara langsung berhadapan dengan klien, baik secara individual maupun dalam kelompok, dan secara tidak langsung berhadapan dengan klien, dalam arti memusatkan perhatian pada institusi kesejahteraan sosial, pada lembaga-lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial, pada evaluasi, analisis, perumusan dan pengembangan program-program kesejahteraan sosial. Dalam kaitan dengan masyarakat, pekerjaan sosial pada umumnya menggunakan praktik tidak langsung. Tetapi, ada aspek-aspek dalam bekerja dengan Masyarakat yang bersifat praktik atau pelayanan langsung. Seperti misalnya pekerja sosial memberikan pelayanan kepada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi Masyarakat yang memerlukan pelayanan langsung, Gilbert, Miler, dan Specht (dalam Fahrudin, 2012: 70-71).

2.4.6 Pendekatan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mempunyai dua pendekatan yaitu praktik langsung (direct practice) dan praktik tidak langsung (indirect practice). Dalam praktik langsung pekerja sosial dituntut untuk tidak hanya berhadapan dengan klien secara individu saja melainkan terkadang harus berhadapan dengan kelompok atau bahkan juga dengan Masyarakat. Maka dari itu, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya tentang dinamika individu, kelompok, ataupun masyarakat saja, tetapi sampai batasbatas tertentu pekerja sosial harus memiliki semua pengetahuan dan keterampilan itu.

Menurut Fahrudin (2012), terdapat 3 metode yang saat ini digunakan yaitu metode mikro, mezzo, dan makro. Metode menunjukan "bagaimana" membantu, yaitu kegiatan instrumental yang bertujuan dan berencana yang melalui kegiatan ini tugas-tugas dilaksanakan dan tujuan-tujuan yang dicapai. Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukan penggunaan secara teratur atas cara-cara sumber-sumber, dan prosedur-prosedur, melalui pelaksanaan jenis peranan-peranan pertolongan seperti sebagai konselor, penasihat, pemungkin, konsultan, administrator, Guru, pembimbing, model, perencana, Peneliti, dan sebagainya, Siporin (dalam Fahrudin, 2012: 72).

Metode terdiri atas pelaksanaan perencanaan interventive yang mengikuti prosedur yang melaksanakan tugas-tugas seperti engagement, perumusan kontrak, assessment, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi.

Ashman (dalam Huraerah, 2010) membuat klasifikasi ketiga metode pekerjaan sosial ke dalam tabel berikut:

Metode **Level Intervensi** No **Unit Intervensi** Intervensi 1 Mikro Individu Individual Casework Mikro/Mezzo Keluarga 2 Family Casework 3 Mezzo Kelompok Groupwork 4 Makro Organisasi & Komunitas Community Organizing / Community Development

Tabel 3.0: Level dan Metode Intervensi

2.5 Tinjauan Tentang Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif

2.5.1 Pengertian Ekonomi Kreatif

Aldy (2016: 8) mengemukakan bahwa ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan.

1) Kreativitas (*Creativity*)

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, atau dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*).

Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.

2) Inovasi (Innovation)

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat.

3) Penemuan (*Invention*)

Istilah ini lebih menekankan pada menciptkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.

Kondisi ekonomi yang diharapkan oleh Indonesia adalah ekonomi yang berkelanjutan dan juga memiliki beberapa sektor

sebagai pilar maupun penopang kegiatan ekonomi di Indonesia. Keberlanjutan yang dimaksud adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap kondisi geografis dan tantangan ekonomi baru, yang pada akhirnya menghasilkan keberlanjutan pertumbuhan (*sustainable growth*).

Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Yang mana Indonesia bisa mengembangkan model ide dan talenta dari Rakyat untuk dapat menginovasi dan menciptakan suatu hal. Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi di dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi.

2.5.2 Ruang Lingkup Ekonomi Kreatif

Dengan adanya konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasipun bisa dikembangkan kearah industri kreatif. Industri kreatif
merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan
kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai
tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi
kreatif sering dilihat sebagai sebuah konsep yang memayungi juga
konsep lain yang populer di awal abad ke-21 ini, yaitu industri
kreatif.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 15 sub-sektor, antara lain:

1) Periklanan (advertising)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media dan sasaran tertentu. Meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan, misalnya dimulai dari riset pasar, setelah itu dibuat perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan relasi kepada publik. Selain itu, tampilan periklanan dapat berupa iklan media cetak (surat kabar dan majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan media reklame, serta penyewaan kolom untuk iklan pada situs-situs website, baik website kelas mikro maupun website kelas makro.

2) Arsitektur

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro (town planning, urban design, landscape architecture) sampai level mikro (detail konstruksi). Misalnya arsitektur taman kota, perencanaan biaya konstruksi, pelestarian bangunan warisan

sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal.

3) Pasar Barang Seni

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan dan internet, meliputi barang barang musik, percetakan, kerajinan, *auto-mobile*, dan film. Seperti halnya barang-barang berbau *vintage* maupun barang-barang peninggalan orang-orang terkenal.

4) Kerajinan (*craft*)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Biasanya berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, batu mulia, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu dan besi), kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal);

5) Desain

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Pembuatan desain apartement, desain rumah susun misalnya.

6) Fesyen (fashion)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, dan juga bisa terkait dengan distribusi produk fesyen.

7) Video, Film dan Fotografi

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film.

8) Permainan Interaktif (game)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ataupun android serta iOS maupun video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub-sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

9) Musik

Kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.

10) Seni Pertunjukkan (showbiz)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan. Misalnya, pertunjukkan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

11) Penerbitan dan Percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12) Layanan Komputer dan Piranti Lunak (software)

Merupakan bentuk teknologi Informasi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, pengolahan termasuk layanan jasa komputer, data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

13) Televisi & Radio (broadcasting)

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan *station relay* (pemancar) siaran radio dan televisi.

14) Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)

Kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk yang berkaitan dengan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

15) Kuliner

Kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan, sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan.